

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah dan Ibrahim Lubis. 1988. *Materi Pokok Pengawasan Pembangunan*. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka.
- Bartol, Kathryn., Tein M., Matthews G., Martin D. 2003. *Management : A Pasific Rim Focus*. Australia: McGraw-Hill.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Handoko, T Hani. 1998. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hamidi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Grassindo.
- Kartiko, Widi Restu. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Koontz, Harold. O'Donnell, Cyril dan Wehrich, Heinz. 1984. *Manajemen Edisi Kedelapan: Jilid 2*. Jakarta: Intermasa.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik: Edisi Pertama*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

- Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mathew J. Miles, A. Michael Huberman, (1992) *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rasul, Sjahruddin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Siagian, P. Sondang. 2001. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, P. Sondang. 2007. *Fungsi-Fungsi Manajerial: Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soebani. 1986. *Dasar-Dasar Manajemen*. Surabaya: Institut Dagang Muchtar.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Stoner, James A.F. dan Freeman, Edward R. 1994. *Manajemen Edisi Kelima*. Jakarta: Intermedia.
- Subagyo, P. Joko (1997). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujamto. 1994. *Asas-asas Manajemen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujamto. 1994. *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan: Edisi Revisi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Sumarto, Hetifa Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif Dan Partisipatif Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suthedja, Made Wahyu dan Swalem, I Gusti Ketut (1989) *Manajemen Pembangunan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. (Ed). 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Syamsi, Ibnu. 2007. *Efisiensi, Sistem, Dan Prosedur Kerja: Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Terry, R. George. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara .
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.

Jurnal

- Artini, Ni Made Dwi., Wahyuni, Made Arie., dan Herawati, Nyoman Trisna. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa melalui Pengimplementasian Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Konteks Disiplin Diri Pada Desa Tigawasa*. Jurnal Akuntansi. Vol 8 No 2. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Juardi, Muhammad Sapril Sardi., Muchlis, Mustakin., dan Putri, Reski Amalia. 2018. *Evaluasi Penggunaan Aplikasi SIKSKEUDES dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Janetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban. Vol 4 No 1. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.
- Putu, J., Atmadja, A.T., Monliasih, N.W. 2017. *Analisis Praktik Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pelaba Pura (Studi Fenomenologi Di Desa Pakraman Jaulah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng)*. Jurnal Akuntansi. Vol 8 No 2. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.

Swasono Priyo Hutomo, Muji. 2017. *Studi Dampak Intensitas Pengawasan Pelaksanaan Silokdes Pada Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan APB Desa di Desa Getas Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*. Jurnal Administrasi Negara. Vol 5 No 2. Universitas Airlangga. Surabaya.

Triadnan, Isman. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Talakar*. Jurnal Administrasi Negara. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Peraturan

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dokumen

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2017

Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa

Warta Pengawasan 2 Tahun 2017 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Wawancara 2018

Internet

Belum Semua Desa Terapkan Siskeudes. Whyudi, Edi Agus. Dibuat 28 Februari 2017. Diakses 26 November 2018. <https://radarlombok.co.id/belum-desa-terapkan-siskeudes.html>

Bimtek Penyusunan Lap Keuangan Pemkab Mamuju. Sulaeman, Bachtiar (Humas). Dibuat 9 Februari 2007. Diakses 5 Oktober 2017. <http://www.bpkp.go.id/berita/read/2064/4305/Bimtek-Penyusunan-Lap-Keuangan-Pemkab-Mamuju.bpkp>

Bimtek Siskeudes untuk Akuntabilitas Keuangan Desa di Kabupaten Mamuju Tengah. BPKP Sulbar, Humas. Dibuat 23 Oktober 2017. Diakses 26 November 2018. <http://www.bpkp.go.id/sulbar/berita/read/18731/0/BIMTEK-SISKEUDES-untuk-Akuntabilitas-Keuangan-Desa-di-Kabupaten-Mamuju-Tengah.bpkp>

Bupati Ponorogo H. Ipong Teken MoU Dengan BPKP Jatim. Kabupaten Ponorogo, Kominfo. Dibuat 19 Juli 2017. Diakses 26 November 2018. <https://ponorogo.go.id/bupati-ponorogo-h-ipong-teken-mou-dengan-bpkp-jatim/>

Daerah Diminta Tepat Waktu Susun Laporan Keuangan Pemda. Kementrian Dalam Negeri. Dibuat 20 April 2017. Diakses 26 November 2018.

<https://www.kemendagri.go.id/index.php/blog/21338-Daerah-Diminta-Tepat-Waktu-Susun-Laporan-Kuangan-Pemda>

Dana Desa Belum Menyentuh Aspirasi Warga. Zainal. Dibuat 11 Desember 2016. Diakses 26 November 2018. <http://suaraindonesia-news.com/dana-desa-belum-menyentuh-aspirasi-warga/>

Dana Desa: Mulai 2015 Setiap Desa Digelontor Rp550 Juta. Saeno. Dibuat _____. Diakses 26 November 2018. <http://finansial.bisnis.com/read/20140820/10/251258/dana-desa-mulai-2015-setiap-desa-digelontor-rp550-juta>

Dana Desa 2018 Tetap Rp 60 Triliun, Ini Alasannya. Aminudin, Muhammad. Dibuat 5 Januari 2018. Diakses 26 November 2018. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3801030/dana-desa-2018-tetap-rp-60-triliun-ini-alasannya>

Deputi BPKP Apresiasi Implementasi Siskeudes Di Kabupaten Muba Capai 100%. Sumsel, Humas BPKP. Dibuat 30 Oktober 2018. Diakses 26 November 2018. <http://www.bpkp.go.id/sumsel/berita/read/20869/0/DEPUTI-BPKP-APRESIASI-IMPLEMENTASI-SISKEUDES-DI-KABUPATEN-MUBA-CAPAI-100.bpkp>

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dibuat _____. Diakses 15 September 2018. http://surabaya.bpk.go.id/?page_id=18473

ICW Sebut Korupsi di Desa Tempati Posisi Ketiga Sepanjang 2016. Mairizal Putra, Lutfy. Dibuat 6 April 2017. Diakses 2 November 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/06/18554321/icw.sebut.korupsi.di.i.desa.tempati.posisi.ketiga.sepanjang.2016>

Kabupaten Pasuruan Jadi Pilot Project Pengelolaan Keuangan Desa 2016. Kabupaten Pasuruan, Tim Liputan. Dibuat 8 Maret 2016. Diakses 26 November 2018. <https://www.pasuruankab.go.id/berita-2837-kabupaten-pasuruan-jadi-pilot-project-pengelolaan-keuangan-desa-2016.html>

Kabupaten Tegal Sebagai Piloting Project SISKEUDES Nasional. Edukasi Desa, Pondok. Dibuat 4 Agustus 2017. Diakses 26 November 2018. <http://pondokedukasidesa.blogspot.com/2017/08/kab-tegal-pilot-project-siskeudes-nasional.html>

Kapuas Hulu: Pemerintah Desa Harus Bisa Menerapkan Prinsip Transparan, Tertib Dan Disiplin Anggaran. Kalbar, Humas BPKP. Dibuat 4 April 2018. Diakses 26 November 2018. <http://www.bpkp.go.id/berita/read/19704/70/WABUP-KAPUAS-HULU-PEMERINTAH-DESA-HARUS-BISA-MENERAPKAN-PRINSIP-TRANSPARAN-TERTIB-DAN-DISIPLIN-ANG.bpkp>

Kejari Klaten Temukan Indikasi Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa. Sidik Prakosos, Taufik. Dibuat 15 November 2017. Diakses 2 November 2018. <http://soloraya.solopos.com/read/20171115/493/869169/kejari-klaten-temukan-indikasi-penyimpangan-pengelolaan-dana-desa>

Kembali Raih Opini WTP dari BPK, Laporan Keuangan Pemprov Jatim Tujuh Kali Kinclong Terus. Anwar, Mujib. Dibuat 25 Mei 2018. Diakses 15 September 2018. <http://jatim.tribunnews.com/2018/05/25/kembali-raih-opini-wtp-dari-bkp-laporan-keuangan-pemprov-jatim-tujuh-kali-kinclong-terus>

Kemendagri Keluhkan Daerah Masih Lambat Susun Laporan Keuangan. Dibuat 25 April 2017. NR, Said. Diakses 26 November 2018. <http://www.klikbontang.com/berita-12038-kemendagri-keluhkan-daerah-masih-lambat-susun-laporan-keuangan.html>

Korupsi Anggaran Desa. Yulianto, Trisno. Dibuat _____. Diakses 2 November 2018. <http://www.sapa.or.id/f2/10753-dana-desa-000k2>

KPK Puji Siskeudes Gowa. Dhyni. Dibuat _____. Diakses 26 November 2018. <http://humas.gowakab.go.id/kpk-puji-siskeudes-gowa/>

KPK Soroti 4 Kelemahan Dana Desa yang Buka Peluang Korupsi. Hidayat, Faieq. Dibuat 2 Agustus 2017. Diakses 2 November 2018.

<https://news.detik.com/berita/d-3584184/kpk-soroti-4-kelemahan-dana-desa-yang-buka-peluang-korupsi>

KPK Temukan 14 Potensi Masalah Pengelolaan Dana Desa. Pramesti, Siwi. Dibuat 12 Juni 2015. Diakses 10 Oktober 2017. <https://nasional.sindonews.com/read/1012030/13/kpk-temukan-14-potensi-masalah-pengelolaan-dana-desa-1434116438>

Kucuran Dana Desa 2016 Capai Rp1 M. Rahmad Fiansyah dan Neneng Zubaidah. Dibuat 28 April 2015. Diakses 26 November 2018. <https://nasional.sindonews.com/read/994739/149/kucuran-dana-desa-2016-capai-rp1-m-1430190985>

Laporan Kinerja Kementerian PANRB. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi .Dibuat _____. Diakses 22 Oktober 2018 <https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen-2/akuntabilitas-kinerja/laporan-kinerja>.

Laporan Pengaduan Masyarakat. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dibuat _____. Diakses 15 September 2018. http://surabaya.bpk.go.id/?page_id=18612

Mendes: Tahun Depan Alokasi Dana Naik, Tiap Desa Bisa Dapat Rp 2 M. Ispranoto, Tri. Dibuat 28 April 2017. Diakses 26 November 2018. <https://news.detik.com/berita/d-3487085/mendes-tahun-depan-alokasi-dana-naik-tiap-desa-bisa-dapat-rp-2-m>

Narasi Tunggal: BPKP Konsisten Mengawal Keuangan Desa. BAPPENAS. Dibuat 18 Mei 2017. Diakses 26 November 2018. <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/narasi-tunggal-bpkp-konsisten-mengawal-keuangan-desa/>

Pariaman Kota Pertama Terapkan Siskeudes. Harian Haluan, Tim Redaksi. Dibuat 30 November 2016. Diakses 26 November 2018. <https://www.harianhaluan.com/news/detail/62416/pariaman-kota-pertama-terapkan-siskeudes>

Pengawasan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Dibuat _____. Diakses 26 November 2018 <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkpbpkp.go.id>

Pertama di NTT, Semua Desa di Nagekeo Gunakan Aplikasi Siskeudes. Vox NTT, Mbay. Dibuat 19 Juli 2017. Diakses 26 November 2018. <http://voxntt.com/2017/07/19/pertama-di-ntt-semua-desa-di-nagekeo-gunakan-aplikasi-siskeudes/>

Piloting dan Bimbingan Teknis Aplikasi Siskeudes Wilayah Kab Tegal. Arif (Humas PKD). Dibuat 31 Juli 2017. Diakses 26 November 2018. <http://www.bpkp.go.id/berita/read/18279/0/Piloting-dan-Bimbingan-Teknis-Aplikasi-Siskeudes-Wilayah-Kab-Tegal.bpkpm>

Realisasi APBN. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dibuat _____. Diakses 10 Januari 2018. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/realisasi-apbn/>

Sedikit, Pemda yang Telah Melaporkan ke BPK. Ali, Sjafriz. Dibuat 9 April 2015. Diakses 13 Oktober 2017. <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/04/09/322849/sedikit-pemda-yang-telah-melaporkan-ke-bpk>

SISKEUDES Bantu Hindari Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Kalbar, Humas BPKP. Dibuat 12 April 2018. Diakses . 2 November 2018. <http://www.bpkp.go.id/berita/read/19769/545/SISKEUDES-Bantu-Hindari-Penyimpangan-dalam-Pengelolaan-Kuangan-Desa.bpkp>

Tujuan UU Desa Disahkan. Keuangan Desa, Admin. Dibuat 5 April 2017. Diakses 2 Oktober 2017. <http://www.keuangandes.com/2017/04/tujuan-uu-desa-disahkan-2/>

2 Kasus Dalam 3 Tahun, Kejari Tabalong Nilai Lemahnya Administrasi Jadi Sebab Korupsi Dana Desa. Rahmadi. Dibuat 8 Agustus 2018. Diakses 2 November 2018.

<http://tvtabalong.com/2-kasus-dalam-3-tahun-kejari-tabalong-nilai-lemahnya-administrasi-jadi-sebab-korupsi-dana-desa/>

4 Faktor Penyebab Adanya Korupsi Dana Desa Versi ICW. Jyestha Chandraditya, Vincentius. Dibuat 11 Agustus 2017. Diakses 2 November 2018. <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/11/4-faktor-penyebab-adanya-korupsi-dana-desa-versi-icw>

97,27 Persen Korupsi Dana Desa Oleh Kades dan Istri. Istimora, D. Dibuat 28 Agustus 2018. Diakses 2 November 2018. http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/337543/97,27_persen_korupsi_dana_desa_oleh_kades_dan_istri.html